

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP BUDGETARY SLACK DENGAN PERTIMBANGAN ETIKA SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau)

Inong*¹, Nining Asniar Ridzal²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: inognino5@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh partisipasi anggaran terhadap *budgetary slack*. (2) Pengaruh partisipasi anggaran terhadap *budgetary slack* dengan pertimbangan etika sebagai variabel moderasi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, Wawancara dan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa (1) Partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap *budgetary slack*. Nilai koefisien partisipasi anggaran sebesar 0,062 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$). Variabel partisipasi anggaran memberikan kontribusi langsung sebesar 8,60% terhadap variabel *budgetary slack*. (2) Interaksi antara partisipasi anggaran dengan pertimbangan etika tidak berpengaruh secara individual terhadap *budgetary slack*, dan pertimbangan etika bukan merupakan variabel moderating. Nilai koefisien uji nilai selisih mutlak partisipasi anggaran dengan pertimbangan etika sebesar - 0,216 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,315 ($> 0,05$). Variabel partisipasi anggaran dengan pertimbangan etika memberikan kontribusi langsung sebesar 25,7% terhadap variabel *budgetary slack*.

Kata Kunci: Partisipasi Anggaran, Senjangan Anggaran, Pertimbangan Etis.

ABSTRACT

This study aims to determine (1) the effect of budget participation on budgetary slack. (2) The effect of budget participation on budgetary slack with ethical considerations as a moderating variable. Data collection methods used are observation, interviews and questionnaires. The data analysis method used is simple linear regression analysis. Based on the results of the research and discussion conducted, the researchers can conclude that (1) Budget participation has a positive and significant effect on budgetary slack. The budgetary participation coefficient value is 0.062 with a significance level of 0.000 (< 0.05). The budgetary participation variable gives a direct contribution of 8.60% to the budgetary slack variable. (2) The interaction between budgetary participation and ethical considerations does not individually affect budgetary slack, and ethical considerations are not a moderating variable. The test coefficient value of the absolute difference between budget participation and ethical considerations is - 0.216 with a significance level of 0.315 (> 0.05). The budgetary participation variable with ethical considerations gives a direct contribution of 25.7% to the budgetary slack variable.

Keywords: Budget Participation, Budgetary Slack, Ethical Considerations.

1. PENDAHULUAN

Anggaran merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun organisasi sektor publik. Anggaran merupakan implementasi dari rencana dari rencana strategi yang telah ditetapkan. Selain itu anggaran merupakan komponen utama dalam perencanaan. Sebagai alat perencanaan, anggaran merupakan rencana kegiatan yang terdiri dari sejumlah target yang akan dicapai oleh para manajer departemen suatu perusahaan dalam melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu pada masa yang akan datang. Sasaran anggaran dapat dicapai melalui pelaksanaan serangkaian aktifitas yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk anggaran. Suhartono dan Solihin (2008) dalam Diyen Novita Garingging (2013).

Pengelolaan keuangan daerah diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 293 dan Pasal 330 memberikan amanat untuk pengelolaan keuangan daerah dengan sebuah peraturan pemerintah. Manajemen keuangan daerah mengalami perubahan sistem anggaran dari model tradisional (*traditional budget system*) menjadi model anggaran berbasis kinerja (*performance budget system*). Sistem anggaran tradisional bersifat tersentralisasi yaitu penyusunan anggaran yang dilakukan secara terpusat, tidak adanya tolok ukur penilaian kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya akan memunculkan *budget padding* atau *budgetary slack*. Sedangkan, penerapan sistem anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat meminimalisir kelemahan dari sistem anggaran tradisional dan menggunakan kinerja sebagai tolok ukur.

Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan standar biaya suatu program atau kegiatan sehingga alokasi anggaran menjadi lebih rasional yang dapat meminimalisir kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk melonggarkan alokasi anggaran pada tiap-tiap unit kerja sehingga anggaran tersebut tidak efisien. Anggaran daerah disusun eksekutif sebagai agen dan disahkan oleh legislatif sebagai prinsipal. Namun, penilaian kinerja berdasarkan tercapai atau tidaknya target anggaran akan mendorong agen untuk melakukan *budgetary slack*. *Budgetary slack* sering terjadi pada tahap perencanaan dan persiapan anggaran daerah, karena penyusunan anggaran seringkali didominasi oleh kepentingan eksekutif dan legislatif, serta kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat (Kartika, 2010).

Menurut Indrawati Yuhertiana (2009) dalam Miyati (2014), *budgetary slack* adalah kecenderungan berperilaku tidak produktif dengan melebihi biaya saat seorang pegawai

mengajukan anggaran belanja. Selain itu *budgetary slack* sebagai suatu tindakan dimana agen melebihkan kemampuan produktif dengan mengestimasi pendapatan lebih rendah dan biaya lebih tinggi ketika diberi kesempatan untuk memilih standar kerja sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Hal ini dapat berdampak buruk pada organisasi sektor publik yaitu alokasi sumber daya kurang optimal dan ketidakadilan sumber daya di seluruh unit bisnis. Unit bisnis dengan *budgetary slack* tinggi menerima sumber daya lebih banyak dari yang seharusnya. Alokasi yang kurang optimal dapat menurunkan efisiensi perusahaan sehingga merugikan para pemangku kepentingan, sedangkan ketidakadilan dapat menggagalkan manajer unit bisnis yang menerima sumber daya relatif kecil.

Setiap penyusunan anggaran Pemerintah Daerah diperlukan suatu pertimbangan etika yang agar dapat menghasilkan keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip maupun pilar karakter nilai etika. Apabila setiap aparat penyusun anggaran daerah memiliki karakter etika yang baik maka dapat mencegah terjadinya *Budgetary Slack*. Hal ini didukung oleh penelitian Syamsuri Rahim, dkk (2013) yang menyatakan bahwa perempuan memiliki pertimbangan etika dan penalaran moral yang lebih kuat daripada laki-laki sehingga dapat mengurangi terjadinya *Budgetary Slack*.

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap *budgetary slack* menyatakan hasil yang tidak konsisten, antara lain Alfi Priyetro (2017), Yuni Nuryani (2018) dan Farida Betniwati Panjaitan (2019) bahwa partisipasi anggaran yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya *budgetary slack*. Berbeda dengan temuan tersebut, penelitian Siti Pratiwi Husain (2011) menyatakan bahwa partisipasi anggaran yang tinggi dapat menurunkan terjadinya *budgetary slack*.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Baubau merupakan salah satu dari dua subsistem dalam sistem pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, SKPD diberikan kuasa untuk menggunakan alokasi dana (anggaran) dan barang atau aset yang dibutuhkan. Pelimpahan kuasa tersebut tidak hanya berisi hak untuk menggunakan dana, namun juga berimplikasi pada sisi kewajiban, yaitu SKPD wajib mewujudkan target kinerja dari usulan kegiatan di anggarannya.

Berdasarkan uraian tersebut, menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap *Budgetary Slack* Dengan Pertimbangan Etika

Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau)''.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi *Budgetary Slack*

menjalankan sebuah pekerjaan dengan sumber daya yang diajukan dalam bentuk anggaran Menurut Arfan (2010) *Budgetary Slack* (senjangan anggaran) adalah selisih antara sumber daya yang sebenarnya diperlukan untuk secara efisien menyelesaikan suatu tugas dan jumlah sumber daya yang lebih besar dan diperuntukkan bagi tugas tersebut. Dapat dikatakan bahwa senjangan anggaran merupakan perbedaan atau selisih antara sumber daya yang sebenarnya dibutuhkan untuk.

2.2 Anggaran Sektor Publik

Moh. Mahsun, Firma dan Heribertus (2011) berpendapat bahwa anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas yang berisi tentang besarnya belanja yang harus dikeluarkan untuk membiayai program dan aktivitas yang direncanakan serta cara untuk mendapatkan dana untuk membiayai program dan aktivitas tersebut.

Menurut Nafarin (2004) dari Wardani (2014), anggaran disarankan menjadi rencana keuangan rutin berdasarkan program yang disetujui. Anggaran adalah rencana kegiatan organisasi, dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dalam unit moneter selama periode waktu tertentu. di samping itu. Menurut Indra Bastian (2013) Anggaran sektor publik Adalah rencana kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk rencana untuk memperoleh pendapatan dan pengeluaran secara moneter. Anggaran sektor publik adalah proses pelaksanaan program berupa pendapatan dan belanja yang dinyatakan dalam satuan moneter dan dapat disimpulkan dibiayai oleh dana masyarakat.

2.3 Partisipasi Dalam Anggaran

Mulyadi (2001) dalam Reno Pratama (2013) Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh kedua pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat keputusan tersebut. Partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti keikutsertaan *operating managers* dalam memutuskan bersama komitmen anggaran mengenai rangkaian kegiatan dimasa yang akan datang yang ditempuh oleh *operating managers* tersebut dalam pencapaian sasaran anggaran.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran menurut Ida Bagus (2010) merupakan proses pengambilan keputusan bersama dalam penganggaran oleh dua pihak atau lebih, dan keputusan tersebut akan berdampak di masa depan bagi pihak yang membuatnya. Miyati (2014) berpendapat bahwa partisipasi dalam anggaran adalah ciri khas penganggaran, dengan masing-masing manajer pusat bertanggung jawab atas proses dan fokus pada penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran merupakan partisipasi seseorang dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran dapat diterapkan karena bawahan yang memiliki lebih banyak informasi dan mengetahui tentang organisasi dapat memberitahu manajernya. Hal ini diharapkan dapat memudahkan atasan dalam mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan organisasi guna mencapai tujuan organisasi.

2.4 Definisi Etika Sektor Publik

Etika berasal dari kata Yunani "ethos" (Ta etha) yang berarti adat istiadat atau adat istiadat. Dalam pengertian ini, etika dikaitkan dengan kebiasaan gaya hidup yang baik, baik secara individu maupun dalam komunitas atau kelompok masyarakat. Artinya etika dikaitkan dengan gaya hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan nilai-nilai dari semua kebiasaan yang dianut dan diwarisi. Turun temurun. Lini dan Magang (2015)

Etika dapat diartikan sebagai moral, dan orang sering kali mengasosiasikan moralitas dengan kebiasaan dan kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat. Etik berarti kesopanan. Etik tidak hanya dapat digunakan dalam pergaulan, tetapi juga dapat digunakan sebagai cara untuk memperlancar hubungan dan memperlancar berbagai hal. Dalam dunia etos kerja, etika menjadi sangat penting karena merupakan kunci dan pedoman profesionalisme dalam bekerja. Oleh karena itu, sebelum kita berbicara secara profesional, kita perlu memahami etika terlebih dahulu. Etika kantor memberi semua karyawan instruksi sebagai panduan untuk bertindak dan memperlakukan dengan cara yang baik dan dengan sikap yang benar. Keterampilan berinteraksi dengan orang lain dan sikap berpikir pribadi tentang sesuatu tercermin dari sikap tindakan kita dan perkataan yang keluar dari mulut kita. Menjadi terbiasa sepenuhnya dengan mempraktikkan etik yang baik dengan sendirinya sangat membantu dalam mencapai moral yang lebih tinggi. Mempraktikkan etik yang buruk bisa menyingkir.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pemerintah Kota Baubau pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa gambaran umum SKPD Kota Baubau, struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing dalam struktur organisasi serta data kuantitatif berupa dokumen yang menyajikan data tentang laporan SKPD Kota Baubau. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari SKPD Kota Baubau.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dapat digunakan untuk penelitian ini, maka perlu dilakukan proses data yang didalamnya terdiri dari informasi-informasi yang diterima oleh penulis baik dalam bentuk maupun tulisan, maka penulis menggunakan :

1. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam hal ini metode wawancara digunakan untuk metode melengkapi dokumentasi yang kurang jelas.
2. Observasi Langsung, dilakukan dengan observasi langsung melalui observasi dan wawancara pada bagian bagian dari SKPD, khususnya bagian keuangan, dan sejumlah informasi yang terkait, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap yang hub
3. Studi Kepustakaan penulis menggunakan beberapa teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang terkait.
4. Kuesioner merupakan suatu teknik data yang memberikan atau memberikan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut.

3.4. Metode Analisis Data

Analisis deskriptif adalah cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan-angka, tetapi menggunakan perbandingan yang berhubungan dengan responden, dengan menggunakan analisis persentase yaitu metode yang membandingkan jumlah responden yang memilih dari masing-masing pilihan dengan jumlah responden secara keseluruhan dikalikan 100%

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan-angka, tetapi menggunakan perbandingan yang berhubungan dengan responden, dengan menggunakan analisis persentase.

Data hasil penelitian ini diperoleh dari 58 tanggapan yang akan dianalisis sesuai dengan teknik analisis yang dipilih untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Kuesioner yang kembali dan layak digunakan adalah 58 buah, dengan tingkat respons 100%. Ringkasan penyebaran dan informasi kuesioner penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Sampel Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jumlah	SKPD	Jenjang Jabatan		Total
		Eselon III	Eselon IV	
1	Sekretariat Daerah	---	2	2
2	DPRD	---	2	2
3	Badan Kominfo	1	2	3
4	Badan Badan Kepegawaian Diklat Daerah	---	2	2
5	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	---	2	2
6	RSUD Kota Baubau	---	2	2
7	Badan Pengawasan Dampak Lingkungan Hidup	---	2	2
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	---	2	2
9	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	1	2	3
10	Inspektorat	---	2	2
11	Satuan Polisi Pamong Praja	1	2	3
12	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan PM	---	2	2
13	Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah	1	2	3
14	Badan Penanggulangan Bencana	---	2	2
15	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1	1	2
16	Dinas Tata Kota	---	2	2
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	---	2	2
18	Dinas Pariwisata	1	1	2
19	Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran	---	2	2

20	Dinas Pertanian dan Kehutanan	---	2	2
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM	1	2	3
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	2	3
23	Dinas Perhubungan	---	2	2
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	---	2	2
25	Dinas Sosial	1	1	2
26	Dinas Kesehatan	---	2	2
Jumlah Sampel				58

4.2. Deskripsi Ciri Responden

Karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok yang menurut jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jabatan, tingkat pengalaman, dan masa kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau. Berikut ini dan situasi yang responsif menurut jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jabatan, tingkat pengalaman, dan masa kerja.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	%
Laki-Laki	31	53,45%
Perempuan	27	46,55%
Jumlah	58	100%

Sumber : Data Diolah (2021)

Tabel 2 menunjukkan bahwa respons dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki sebanyak 31 orang (53,45%) dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 27 orang (46,55%).

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	%
31-40	23	39,66%
41 - 50	32	55,17%
51-60	5	8,62%
Jumura	58	100%

Sumber : Data di Olah (2021)

Tabel 3 menunjukkan bahwa tanggapan dalam penelitian ini sebagian besar berusia antara 41 - 50 tahun yaitu sebanyak 32 orang (55,17%), berusia 31 - 40 tahun sebanyak 23 orang (39,66%), dan berusia 51 - 60 tahun sebanyak 5 orang (8,62%).

sebanyak 32 orang (55,17%), dan terakhir berusia antara 31 -40 Tahun Sebanyak 5 Orang (8,62%).

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	%
S1	31	53,45%
S2	22	37,93%
S3	5	8,62%
Jumlah	58	100%

Sumber : Data diolah (2021)

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang dikumpulkan dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 31 orang (53,45 %%), kemudian S2 sebanyak 22 orang (37,93%) dan terakhir S3 sebanyak 5 orang.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pengalaman

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pengalaman

Tingkat Pengaraman	Frekuensi	%
<1	5	8,62%
1-5	27	46,55%
> 5	26	44,83%
Jumlah	58	100%

Sumber : Data diolah (2021)

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang dihitung dalam penelitian ini memiliki tingkat pengalaman antara 1 - 5 tahun sebanyak 27 orang (46,55%), kemudian tingkat pengalaman lebih dari 5 tahun sebanyak 26 orang (44,83%). Terakhir, memiliki tingkat pengalaman kurang dari 1 tahun sebanyak 5 orang (8,62%).

e. Kategori Responden Berdasarkan Masa Kerja

Table 6. Masa Kerja

Masakerja	Frekuensi	%
<1	3	5,17%
1-10	36	62,07%
11-20	12	20,69%
21-30	5	8,62%
≥ 31	2	3,45%

Sumber : Data Diolah (2021)

Tabel 6 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki masa kerja 1 - 10 tahun sebanyak 36 orang (60,07%). Selanjutnya, responden memiliki masa kerja 11 - 20 tahun sebanyak 12 orang (20,69%), masa kerja 21 - 30 sebanyak 5 orang (8,62%), masa kerja kurang dari 1 tahun sebanyak 3 orang (5,17%) . Terakhir, responden yang memiliki masa kerja lebih dari 31 tahun sebanyak 2 orang (3,45%)

4.3. Pembahasan

a. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap *Budgetary Slack*.

Hasil uji hipotesis 1 menunjukkan bahwa nilai koefisien partisipasi anggaran sebesar 0,062 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap *budgetary slack*. Artinya, jika partisipasi anggaran naik, maka *budgetary slack* juga akan naik. Jika partisipasi anggaran turun, maka *budgetary slack* juga akan turun. Hipotesis yang menyatakan partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap *budgetary slack* diterima.

Dalam proses penyusunan APBD, aparat pemerintah Kota Baubau cenderung menargetkan pendapatan di bawah kemampuan optimal berdasarkan pertimbangan nilai SiLPA Kota Baubau tidak pernah terlalu besar dari tahun ke tahun, karena pendapatan Kota Baubau juga tidak besar. Dilihat dari sisi belanja, potensi *slack* terdapat pada belanja barang dan jasa.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aparat pemerintah daerah Kota Baubau cenderung menciptakan *budgetary slack* agar target yang direncanakan mudah dicapai. Hal ini sejalan dengan penelitian Andi Kartika (2010), Karsam, (2013), Nila Aprila dan Selvi Hidayani (2012).

b. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap *Budgetary Slack* dengan Pertimbangan Etika sebagai Variabel Moderasi.

Hasil hipotesis 2 menunjukkan bahwa nilai koefisien nilai selisih mutlak partisipasi anggaran dengan pertimbangan etika sebesar -0,216 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,315 ($> 0,05$) berarti bahwa partisipasi anggaran dengan pertimbangan etika berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *budgetary slack*. Hasil ini menunjukkan bahwa pertimbangan etika bukan sebagai variabel moderasi. Hipotesis

yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap *budgetary slack* dengan pertimbangan etika yang rendah ditolak (tidak didukung data).

Budgetary slack dapat dikurangi jika pemerintah daerah memiliki pertimbangan etika. Pertimbangan etika yang rendah mampu mengurangi *budgetary slack*, apalagi aparat pemerintah daerah memiliki pertimbangan etika yang tinggi maka akan mengurangi *budgetary slack*. Dalam partisipasi anggaran, semakin bawahan tersebut memperhatikan etika maka *slack* yang dibuatnya akan semakin kecil dibanding orang yang tidak peduli dengan etika, orang tersebut akan semakin jujur dan bertanggung jawab akan apa yang ia lakukan dan putuskan serta tidak akan mengutamakan kepentingan sendiri. Pertimbangan etika dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman (Indrawati Yuhertiana, 2005:6). Browning & Zabibski dalam Indrawati Yuhertiana (2005) berpendapat bahwa manajer dengan pendidikan tinggi melihat bonus sebagai perilaku tidak etis. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas pendidikan aparat pemerintah daerah Kota Baubau adalah S1 sebanyak 31 orang (53,45%) dan S2 sebanyak 22 orang (37,93%) dan S3 sebanyak 5 orang (8,62%). Kidwel *et al* dalam Indrawati Yuhertiana (2005) berpendapat bahwa manajer yang sudah lama bekerja pada bidang tertentu organisasi cenderung memperlihatkan respon etis. Tingkat pengalaman aparat pemerintah daerah Kota Baubau antara 1 – 5 tahun sebanyak 27 orang (46,55%) dan tingkat pengalaman lebih dari 5 tahun sebanyak 26 orang (44,83%) lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengalaman kurang dari 1 tahun sebanyak 5 orang (8,62%).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan Nilai koefisien partisipasi anggaran sebesar 0,062 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($<0,05$). Variabel Partisipasi anggaran memberikan kontribusi langsung sebesar 8,60% terhadap senjangan anggaran yang berfluktuasi.
2. Interaksi antara partisipasi anggaran dengan pertimbangan etika tidak berpengaruh secara individual terhadap *budgetary slack*, dan pertimbangan etika bukan merupakan variabel moderating. Nilai koefisien uji nilai selisih mutlak partisipasi anggaran dengan

pertimbangan etika sebesar - 0,216 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,315 ($> 0,05$). Variabel partisipasi anggaran dengan pertimbangan etika memberikan kontribusi langsung sebesar 25,7% terhadap variabel *budgetary slack*.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Farida Betniwati Panjaitan 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Senjangan Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Propinsi Jawa Barat. JAFTA.. gulungan 1 Nomor 1, Mei (2019). Diakses 9 Januari 2020. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jafta/article/view/1529>
- Garingging, Diyen, Novita,. 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi dan Persepsi Inovasi sebagai Variabel Intervening pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun. Skripsi Jurusan Akuntansi, Kekhususan Akuntansi Pemerintahan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan Diakses 20 Januari 2020.<http://digilib.unimed.ac.id/13427/>
- Garnisun, lain. 2013. Akuntansi Manajerial. Jakarta: Salemba Empat.
- Gozari, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS21 Update PLS Regression. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hang Seng dan Mowen. 2013. Akuntansi Manajerial. Salemba Empat. Jakarta.
- Ida Bagus Agung Dharmanegara, 2010, Penganggaran Perusahaan Teoridan. Aprikashi, Yogyakarta: Grahairum.
- Imam Gozari. 2011. Program Multivariasi Analitik IBM SPSS 19. Edisi Kerima. Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____. 2013. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS. Edisi 7. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indra Bastian. 2013. Sistem Akuntansi Sektor Publik, edisi 3, Jakarta: Salemba Empat.
- Kartika, A. 2010. Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Ketidakpastian Lingkungan Dalam Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Senjangan Anggaran (Studi Empiris Pada Rumah Sakit Swasta di Kota Semarang). Kajian Akuntansi, 2, 39-60. Diakses 20 Januari 2020. <http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe4/article/viewFile/225/164>.
- Rubis, Iksan, Alfian. 2010. Akuntansi Keperilakuan, Edisi dua, Salemba Empat: Jakarta.
- Miyatti. 2014. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Budgetary Slack dengan Pertimbangan Etika Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta.
- Meaux. Mahsun, Pharmadan Helibertus. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Monika Palupi Murniati, dkk. 2013. Pengujian Hipotesis. Semarang: Unika Soegijapranata.
- Kucai Cina aprila dansel bihidayani. 2012. Dampak partisipasi anggaran, asimetri informasi, penekanan anggaran dan komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran di SKPD Pemerintah Kota Bengkulu. Kemajuan Konferensi Malaysia-Indonesia ke-13 (MIICEMA) tentang Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Hlm. 617-628. Diakses 18 Januari 2020. <http://repository.unib.ac.id/589/1/MIICEMA%20UnSri-323%20Nila%20Aprila.pdf>
- Prietono Alfi, 2017. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Budgetary Slack Dengan Gaya Kepemimpinan Dan Pertimbangan Etika Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris SKPD Kota Pariaman). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Diakses 10 Januari 2020. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2948..>

- Reno, Platama. 2013. "Pengaruh Partisipasi Terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasi dan Motivasi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada SKPD di Kota Padang)". Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- LiniDan Hanifati Intern. 2015. Etika Profesi dan Pengembangan Privadi. Palembang: Citrabooks Indonesia.
- Syamsuri Rahim, dkk. 2013. "Perbedaan gender dalam dampak penilaian etis dan penalaran moral pada perilaku pelanggaran anggaran di sektor publik." Jurnal interdisipliner penelitian kontemporer dalam bisnis. 5 (II). Hlm. 227-241. Diakses 15 Januari 2020.<https://journal-archieves33.webs.com/227-241.pdf>
- Siti Pratiwi Husain 2011. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderate. INOVASI. 8 (III). Hlm. 102-114.
- Suartana, Saya Wayang. 2010. Akuntansi Keperilakuan Teoridan Implementasi. Yogyakarta: Penerbit Andy.
- Sugiyono 2010. Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND, Bandung: Alpha Beta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Nuriani Uni 2018. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Budgetary Slack Dengan Psychological Capital Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Rumah Sakit di Kota Jayapura). Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Volume 13, Nomor 1, Mei 2018: 38–52. Diakses 19 Januari 2020.
<http://ejournal.akuntansiuncen.ac.id/index.php/JurnalAkuntansiUncen/article/view/34>
- Wardani VK 2014. Dampak faktor dasar terhadap kebijakan dividen: Bukti di Bursa Efek Indonesia.